



TESIS

Judul:

**Upaya Hukum Notaris Terhadap Kewenangan Penjatuhan
Sanksi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham
(Study Kasus Putusan No. 235/G/2019/PTUN.JKT)**

Disusun Oleh:

**THERESIA RATNA SARI P
NIM. 217212005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

**Upaya Hukum Notaris Terhadap Kewenangan Penjatuhan
Sanksi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham
(Study Kasus Putusan No. 235/G/2019/PTUN.JKT)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara**

Disusun Oleh:

Nama : THERESIA RATNA SARI P
NIM : 217212005
Program Studi : Magister Kenotariatan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : THERESIA RATNA SARI P
NIM : 217212005
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Upaya Hukum Notaris Terhadap Kewenangan Penjatuhan Sanksi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham (Study Kasus Putusan No.235/G/2019/PTUN.JKT)
Title : Notary Legal Remedies Against The Authority To Impose Sanctions By The Ministry Of Law And Ham (Study of Decision Case No.235/G/2019/PTUN.JKT)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2023.

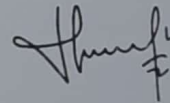
Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

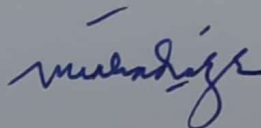
Pembimbing:

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Jakarta, 20-Juli-2023

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

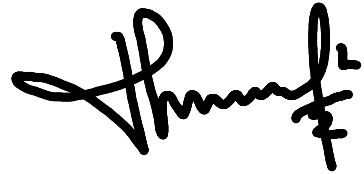
Persetujuan

Nama : THERESIA RATNA SARI P
NIM : 217212005
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Upaya Hukum Notaris Terhadap Kewenangan Penjatuhan Sanksi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham (Study Kasus Putusan No.235/G/2019/PTUN.JKT)

Proposal Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



ABSTRAK

- A. Nama** : THERESIA RATNA SARI P
- B. Judul** : “Upaya Hukum Notaris Terhadap Kewenangan Penjatuhan Sanksi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham (Study Kasus Putusan No.235/6/2019/Ptun.JKT)”
- C. Halaman** :
- D. Kata Kunci** : *Ratio Decidendi, Upaya Hukum, Notaris*
- E. Isi abstrak** :

Pada kasus putusan Putusan No 235/G/2019/PTUN.JKT notaris telah melakukan penandatanganan akta di luar wilayah jabatannya, laporan dari peristiwa tersebut menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat jabatan notaris, KTUN tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan MPW Notaris yang dikuatkan oleh usulan Putusan MPP Notaris. Ratio decidendi putusan perkara tersebut tidak mempertimbangkan kewenangan atribusi Kemenkumham dalam mengeluarkan KTUN kepada Notaris, selain itu penerbitan KTUN dalam perkara *a quo* tidak melanggar AAUPB sebagai dasar gugatan ke PTUN. Sehingga Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang terkena sanksi pelanggaran jabatan notris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? Dan bagaimanakah *ratio decidendi* Putusan No 235/G/2019/PTUN.JKT terhadap kewenangan pengawas notaris dalam memberikan sanksi jabatan notaris?.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang terkena sanksi pelanggaran jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat ditempuh melalui 2 cara, yang pertama upaya administrasi yang terdiri atas keberatan dan banding administrasi, cara yang kedua yakni mengajukan gugatan ke PTUN atas pembatalan KTUN pemberian sanksi tersebut,. *Ratio decidendi* Putusan No 235/G/2019/PTUN.JKT terhadap kewenangan pengawas notaris dalam memberikan sanksi jabatan notaris tidak memperhatikan kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada kementerian hukum dan ham dalam mengeluarkan KTUN pemberian sanksi kepada Notaris, dan tidak mempertimbangkan procedural yang telah dilalui secara sistematis dan kehati-hatian dalam mengeluarkan KTUN tersebut yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk penjatuhan sanksi secara tidak terhormat kepada Notaris dalam perkara ini.

Maka, dibutuhkan regulasi yang khusus terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris yang dijatuhi sanksi terhadap lembaga yang memiliki kewenangan dengan berdasar atas regulasi general Undang-Undang Administrasi pemerintahan dan undang-undang jabatan notaris. Dan dibutuhkan asas kehati-hatian dan kecermatan dalam membuat Putusan terutama *judex fuctie* yang akan berimplikasi langsung kepada para pihak dalam hal ini notaris dan Kemkumham terkait pemulihan nama pejabat notaris dan pengembalian pemegang protocol atas jabatan notaris yg dipecat juga Ketidak balance sistem administrasi setelahnya.

- F. Daftar acuan** : 74 (1983-2022)
- G. Pembimbing** : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H, M.Hum
- H. Penulis** : THERESIA RATNA SARI P

ABSTRACT

- A. Name** : THERESIA RATNA SARI P
- B. Thesis Title** : “ Notary Legal Remedies Against the Authority of Imposing Sanctions by the Ministry of Law and Human Rights (Decision Case Study No.235/6/2019/Ptun.JKT)”
- C. Pages** :
- D. Keywords** : *Ratio Decidendi, Legal Remedies, Notary*
- E. Abstract Content** :

In the case of Decision Decision No. 235/G/2019/PTUN.JKT the notary has signed a deed outside his territory of office, the report of the incident issued a Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on August 6 2019 Concerning Disrespectful Dismissal of the position of notary, the KTUN is a follow-up to the MPW Notary's proposal which was strengthened by the MPP Notary's Decision proposal. The ratio decidendi for the case decision did not take into account the attribution authority of the Ministry of Law and Human Rights in issuing KTUNs to Notaries, besides that the issuance of KTUNs in the a quo case did not violate AAUPB as the basis for a lawsuit to the Administrative Court. So what are the legal remedies that can be taken by a notary who is subject to the sanction of a notary's office violation based on the notary's office law? And what is the ratio decidendi of Decision No. 235/G/2019/PTUN.JKT on the authority of the notary supervisor in imposing sanctions on the position of a notary?

Legal remedies that can be taken by a Notary who has been sanctioned for breaching the position of a notary based on the Notary Office Law can be taken in 2 ways, the first is administrative efforts consisting of administrative objections and appeals, the second way is to file a lawsuit to the PTUN for canceling the KTUN imposing sanctions the., Ratio decidendi Decision No 235/G/2019/PTUN.JKT regarding the authority of the notary supervisor in imposing sanctions on the position of a notary does not pay attention to the absolute authority granted by law to the ministry of law and human rights in issuing KTUN imposing sanctions on notaries, and does not consider the procedural has been carried out systematically and carefully in issuing the KTUN which has met the requirements and criteria for dishonorably imposing sanctions on a Notary in this case.

Thus, special regulations are needed regarding legal remedies that can be taken by Notaries who are subject to sanctions against institutions that have authority based on general regulations on government administration laws and notary office laws. And the principle of prudence and accuracy is needed in making a decision, especially judex fuctie which will have slim implications for the parties, in this case the notary and the Ministry of Law and Human Rights regarding the restoration of the name of the notary official and the return of the protocol holder for the notary position who was dismissed as well as the imbalance in the administrative system afterwards.

- F. Reference** : 74 (1983-2022)
- G. Lecturer** : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H, M.Hum
- H. Author** : THERESIA RATNA SARI P

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, sebab atas penyertaan dan berkat dari-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP KEWENANGAN PENJATUHAN SANKSI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (STUDY KASUS PUTUSAN NO.235/6/2019/PTUN.JKT)”**

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara. Penyusunan Tesis ini telah penulis susun dan selesaikan dengan maksimal, tentunya penulis tidak sendiri saat menyusun Tesis ini. Penulis telah dibantu berbagai pihak saat menyusun tesis ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehingga penulis merasa ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada yang sayahormati :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H, M.Hum selaku Ketua

Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan juga selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penyusunan tesis ini. Penulismengucapkan banyak terima kasih dengan segala pengetahuan, kesabaran dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam waktu yang tidak singkat.

4. Kepada seluruh Dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepada kedua orang tua, seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan, doa serta dukungan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Saya selaku penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam pembuatan tesis ini, maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga karya tesis ini dapat bermanfaat memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca.

Jakarta, Juli 2023
Penulis

Theresia Ratna Sari P
217212005

Pernyataan

Nama : THERESIA RATNA SARI P
NIM : 217212005
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Upaya Hukum Notaris Terhadap Kewenangan Penjatuhan Sanksi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham (Study Kasus Putusan No.235/G/2019/PTUN.JKT)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05-Juli-2023
Yang menyatakan



THERESIA RATNA SARI P
NIM. 217212005

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Sampul dalam	
Halaman Pengesahan	
Halaman Persetujuan.....	
Abstrak	
Abstact	
Kata Pengantar	
Pernyataan Orisinalitas	
Daftar Isi	
Daftar Lampiran.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis	9
1. Teori Kewenangan	9
2. Teori Pengawasan	12
3. Teori Perlindungan Hukum	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data Kepustakaan	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Pendekatan Penelitian	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II Tinjauan Pustaka	22
A. Landasan Konseptual	22
1. Tinjauan Umum Konsep Upaya Hukum.....	22
2. Tinjauan Umum Konsep Jabatan Notaris	35
B. Kerangka Teoritis	59
1. Teori Kewenangan	59
2. Teori Pengawasan	63
3. Teori Perlindungan Hukum	66
C. Penelitian Terdahulu.....	69
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	72
a. Pihak yang Berperkara.....	72
b. Pokok Perkara	72
c. Pertimbangan Hakim	78
d. Putusan.....	98
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	100
a. Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Notaris Yang Terkena Sanksi Pelanggaran Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris	100

b. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan No 235/G/2019/PTUN.JKT Terhadap Kewenangan Pengawas Notaris Dalam Memberikan Sanksi Jabatan Notaris	112
BAB V PENUTUP	127
a. Kesimpulan.....	127
b. Saran	128
Daftar Pustaka	129
Daftar Lampiran
Riwayat Hidup
Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tesis
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 4 : Rekap Bimbingan Tesis
- Lampiran 5 : Formulir Kesiediaan Pembimbing Tesis
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- Lampiran 7 : Bukti Publikasi Artikel Jurnal
- Lampiran 8 : Letter of Acceptance (LoA)
- Lampiran 9 : Artikel Jurnal Publikasi
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Survei atau Riset Kemenkumham
- Lampiran 11 : Surat Permohonan Survei atau Riset PTUN
- Lampiran 12 : Hasil Turnitin
- Lampiran 13 : Pedoman Wawancara Kemenkumham
- Lampiran 14 : Pedoman Wawancara PTUN
- Lampiran 15 : Dokumentasi Penelitian Kemenkumham
- Lampiran 16 : Dokumentasi Penelitian PTUN
- Lampiran 17 : Putusan Pengadilan